

## KEBIJAKAN DAN AGENDA PRIORITAS TAHUNAN 2015-2016 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

- MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DAN MEMBANTU DAERAH YANG KAPASITAS BERPEMERINTAHAN BELUM CUKUP MEMADAI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK
- DESENTRALISASI ASIMETRIS SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENGELOLAAN PEMERINTAHAN GUNA MENSINERGIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN SEBAGAI SATU KESATUAN SISTEM YANG TIDAK TERFRAGMENTASI

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH, TERUTAMA DESA, KAWASAN TIMUR INDONESIA DAN KAWASAN PERBATASAN DENGAN MEREFORMASI TATA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DENGAN CARA PENGATURAN KEMBALI SISTEM DISTRIBUSI KEUANGAN NASIONAL DENGAN MELIHAT KONDISI DAN KEBUTUHAN DAERAH YANG ASIMETRIS</li> <li>• PENATAAN DAERAH OTONOM BARU YANG BERORIENTASI PADA KESEJAHTERAAN RAKYAT</li> <li>• MEMBANGUN TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DENGAN MENDORONG PENGALOKASIAN ANGGARAN LEBIH BANYAK UNTUK PELAYANAN PUBLIK</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MENJALANKAN REFORMASI BIROKRASI SECARA BERKELANJUTAN DENGAN RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN, PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, MENINGKATKAN KOMPETENSI APARATUR, MEMPERKUAT MONITORING DAN SUPERVISI ATAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK DENGAN PENGUATAN DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN SEBAGAI UJUNG TOMBAK</li> <li>• IMPLEMENTASI UU DESA SECARA SISTEMATIS, KONSISTEN, DAN BERKELANJUTAN DENGAN FASILITASI, SUPERVISI DAN PENDAMPINGAN.</li> <li>• MEMBUKA PARTISIPASI PUBLIK MELALUI CITIZEN CHARTER, DENGAN MENDORONG KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK, SERTA MENDORONG PENGELOLAAN BADAN PUBLIK YANG BAIK</li> </ul> |
|--|--|

DALAM SETIAP PENGAMBILAN KEBIJAKAN POLITIK PEMBANGUNAN PEM. PUSAT DAN PEM. DAERAH BERSAMA DPRD HARUS BERLANDASKAN PADA IMPLEMENTASI TRI SAKTI DAN VISI-MISI PEMERINTAHAN PRESIDEN RI BPK. IR. JOKO WIDODO & WAPRES BPK. JUSUF KALLA

